

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEMARANG SMART CITY

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata 1 (S1)

Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wahid Hasyim Semarang



Oleh :

Nama: Fikroh Failashufiyah

NIM : 162010024

**PROGAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEMARANG SMART CITY

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1).

Program Studi:

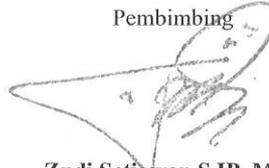
ILMU POLITIK

Oleh:

Fikroh Failashufiyah

Disetujui oleh:

Pembimbing



Zudi Setiawan S.IP.,M.Si

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Implementasi Kebijakan Semarang Smart City

Penyusun

Fikroh Failashufiyah

162010024

Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan di depan tim penguji
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Pada hari : Senin, 18 Mei 2020

Jam : 11.00

Tempat : Aplikasi Virtual (online)

Skripsi ini benar-benar karya penyusun

Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan,
Penyusun bersedia bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Tim Penguji

NamaTanda tangan

1.Zudi Setiawan, S.IP., M.Si

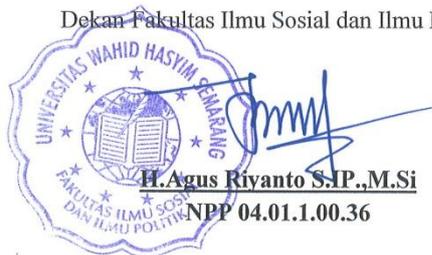
2. H. Agus Riyanto S.IP.,M.Si

3. Muhammad Nuh S.Sos.,M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

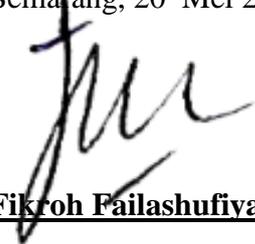


H. Agus Riyanto S.IP.,M.Si
NPP 04.01.1.00.36

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Semarang Smart City” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan pihak lain kecuali yang secara tertulis diacu dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2020



Fikroh Failashufiyah

Motto

“Rezeki itu pasti, maka kemuliaanlah yang harus dicari. ”

Seorang yang produktif itu agar bisa,

- Menambah syukur
- Menegakkan taat
- Berbagi manfaat

-Septi Peni Wulandani

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas berkatNya, akhirnya penulis. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu politik Universitas Wahid Hasyim.

Penulis menyadari tanpa adanya doa, dukungan,saran dan fasilitas dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Agus Riyanto,S.IP.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim.
2. Bapak Muhammad Nuh, S.Sos.,M.Si,selaku dosen penguji II
3. Bapak Zudi Setiawan,S.IP.,M.Si selaku Kepala Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta selaku Dosen Pembimbing dan dosen wali yang telah memberikan waktu luangnya ,saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dan senantiasa memotivasi sehingga skripsi ini dapat dapat terselesaikan.
4. Seluruh staff pengajar Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua orang tuaku Bapak Aziz Ans dan Ibu sulistiyah serta adikku Inas yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
6. Seluruh keluarga besar di Kudus dan Semarang terimakasih untuk dukungannya selama ini.
7. Hanifiatus Samhah dan Dewi Shinta yang selalu menemani, menyemangati, dan mendukungku selama perkuliahan.

8. Sahabat-sahabat terdekatku yang tergabung dalam Komunitas Asa Edu, dan Pagi Berbagi Semarang Kak Okta, Kak Putri, Ifan, Ikang, Zahra, Mas Fajri, Mas Hendra, Mas Fauzi, dan mbak Ulfah, terima kasih untuk kenangan di Semarang selama ini, semoga kita tetap bisa terus bersahabat selamanya.
9. Teman-teman bimbingan pak Zudi Setiawan, Shinta dan Hanif selalu membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar BEM FISIP 2019 terutama divisi Kajian Ilmiah terima kasih untuk kekompakan kita selama ini.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Politik 2016 terimakasih telah menjadi keluarga yang nyaman.
12. Teman teman Kos Putri Soenardi, Arina, Riri, Neli, yulia, dek arin, pipit, mbak via terimakasih untuk kekonyolan dan kekocakan kita selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karna keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan

Semarang, 20 Mei 2020

Penulis

Fikroh Failashufiyah

ABSTRAK

Semarang sebagai kota beranjak metropolitan tidak bisa melepaskan diri dari problem kotakota dunia. Gagasan smart city dipercaya bisa menjadi solusi untuk membuat kota-kota besar seperti Semarang menjadi lebih ramah dan lebih humanis. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi sebagai data sekundernya. Dan penelitian ini berlokasi di kota Semarang.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa implementasi program smart city di kota Semarang sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan sarana dan prasarana pendukung semarang smart city sudah memadai.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Semarang, Smart City

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Teori	6
a) Kebijakan Publik.....	4
1. Implementasi Kebijakan Publik	6
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
3. Reformasi Perkotaan	19
b)Smart City	23
4. Konsep Smart City	23
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	18

2.	Sumber Penelitian	18
3.	Metode Pengumpulan Data	29
4.	Metode Analisis Data.....	29
G.	Lokasi Penelitian.....	32
H.	Sistematika Penulisan.....	32
BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG		33
A.	Kondisi Geografis	35
B.	Kondisi Demografis	36
C.	Semarang Smart City	40
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Implementasi Kebijakan Semarang Smart City	48
BAB IV Penutup		98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN		102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Kebijakan publik di Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini masih diwarnai “kepentingan publik terbatas” daripada masyarakat luas. Smart City atau kota cerdas merupakan suatu konsep kebijakan yang berusaha mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan kota yang ramah manusia dan hal ini sedang marak diadopsi oleh kota-kota di Indonesia. Tata kelola yang cerdas merupakan salah satu aspek utama dalam menyukkseskan keberadaan smart city. Kota Semarang merupakan salah satu dari 100 kota yang masuk dalam Program Percepatan Smart City yang masuk dalam peringkat 2 dalam penilaian IKCI. IKCI adalah Indeks Kota Cerdas Indonesia ¹

Fenomena di kota kota besar Indonesia (terutama di Pulau Jawa) saat ini mempunyai kecenderungan kota yang makin sakit.Penyakit perkotaan saat ini bisa kita lihat, misalkan banjir setiap kali musim hujan, kekurangan air saat musim kemarau, sampah yang tak terkelola dengan baik,limbah rumah tangga dan limbah industri, kemacetan lalu lintas, polusi udara, kemiskinan, pengangguran dan kejahatan.²

¹ Studio Tata Kelola Perkotaan Semarang Smart City 2019 Aditya Purnomo Aji diakses melalui https://issuu.com/adityapurnomoa/docs/30_april_2019-slide_presgab_fix_v2 Pada 16 Desember 2019 Pukul 10.25.

² Kota-Kota di Indonesia Semakin Sakit. R Firkan Maulana diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/firkan/5b8f409c43322f28c156ff32/kota-kota-besar-di-indonesia-makin-sakit> Pada 16 Desember 2019 Pukul 11.16

Termasuk masalah kemiskinan di perkotaan dibalik gedung-gedung tinggi perlu diberi perhatian khusus, termasuk didalamnya terkait masalah perumahan, pemukiman dan sektor informal.

Mohammad Agung Ridlo dalam bukunya yang berjudul *Mengupas Problema Kota Semarang* menjelaskan dengan komprehensif dengan mengambil conroh negara Singapura dengan konsep Housing Development Board (HDB) dapat menghilangkan bentuk-bentuk kemiskinan di perkotaan menurut HDB tidak hanya dalam bentuk perumahan fisik saja tetapi (pemukiman atau Human Settlement) dengan segala perangkat tempat kerja, pelayanan umum, maupun komersial, dengan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan nyaman yang kesemuanya dapat memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas.³

Adapun masalah transportasi, khususnya transportasi darat, pada dasarnya karena Indonesia terjerat dengan politik kapitalisme pabrik mobil. Dan tentunya mobil pribadi yang banyak dipasarkan, bukan transportasi umum atau *public transport*. Sehingga secara konseptual *urban transport* dikuasai atau dibanjiri mobil pribadi menjadi budaya dalam kehidupan kota yang sudah lama sekali dan tidak disadari.⁴

Menurut Prof.Dr.Ir.Sugiono Soetomo dalam pengantar buku *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan* memberi gambaran kebijakan publik yang dilakukan oleh negara China dapat dijadikan sebagai refleksi penataan transportasi publik. Keadaan China pada tahun 1980an ketika China membuka kearah ekonomi pasar, bahwa transport Bus yang banyak sekali merajai dunia

^{3 3} Agung Ridlo Mohammad, 2015. *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan* Yogyakarta : Pustaka Deepublish

^{4 4} ^2 Ibid., hlm. xii

Nugroho,Riant,, 2008.*Public Policy*. Jakarta : PT Gramedia.

transportasi dan jelas adalah kendaraan transportasi publik. Mobil pribadi jumlahnya minoritas, waktu itu belum dibangun transportasi publik massal seperti Metro atau underground train. Transport massal tersebut dibangun di kota baru Zen-Zen mulai sekitar tahun 2000an. Jadi politik transportasi penting sekali. Gambaran jalanan besar yang semrawut oleh berbagai jenis kendaraan yang memiliki kecepatan dan ukuran yang berbeda menaikkan risiko kecelakaan, saat ini pola lalu lintas di Indonesia masih mementingkan kendaraan dibanding manusia. Idennya dapat dilacak dari pemikir Inggris Jhon Stuart Mills, gagasan dasarnya adalah bahwa semua orang mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Konsep egaliter ini kelak tidak berhenti di tingkat antar-individu, tetapi antar individu dan negara, yang aturan bersamanya (kebijakan publik) merupakan proses yang pada tempatnya meletakkan setiap individu masyarakat menjadi bagiannya.⁵⁶

Kota Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah, sekaligus termasuk sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Artinya bahwa, terjadi pergerakan penduduk setiap hari masuk dan keluar dari kota-kota di sekitarnya, area metropolitan kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran- Kabupaten Semarang, Salatiga dan Puwodadi Kab. Grobogan).

Semarang sebagai kota yang beranjak metropolitan tidak bisa melepaskan diri dari problem kota-kota metropolitan dunia. Gagasan Smart City dipercaya bisa menjadi solusi untuk membuat kota-kota besar seperti Semarang menjadi lebih

ramah dan lebih humanis. Untuk itu penulis merasa tertarik dan tertantang untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kebijakan Smart City di Kota Semarang ini.

Gagasan Semarang Smart City (SSC) diawali pada tahun 2013 Ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama PT Telkom dan mulai pemasangan 2.300 Free Wifi di area publik. Tahap awal Smart City dimulai dari Cyber Government. Apa itu Cyber Government? Cyber Government adalah konsep tata kelola pemerintah dengan ditandai terintegrasinya data-data dari berbagai dinas terkait, permasalahan, data data statistic yang terhubung dalam satu server, harapannya dengan seperti itu dapat memudahkan pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tahap lanjutan adalah Cyber Society yang terangkum dalam 6 Komponen yaitu Peraturan, Ifrastruktur, SDM, Data Center, Aplikasi dan Integrasi Sistem. Visi Smart City Kota Semarang mengusung Slogan Menjadikan Kota Lebih Baik dan Hebat (*Making the Cities Better and Great*) atau yang lebih dikenal dengan tagline yang lebih pendek yaitu Semarang Hebat. Tagline ini dapat di temukan diberbagai sudut kota yang strategis seperti jalanan utama, tempat wisata, dan badan BRT (Bus Rapid Transit) milik Kota Semarang. Indikator Smart City Kota Semarang terbagi pada 10 aspek yang dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu aspek besar yang pertama yaitu Sumber Daya manusia, Keterpaduan Sosial, Ekonomi, Manajemen Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Aspek besar yang kedua meliputi Lingkungan Hidup, Mobilitas dan Transportasi, Perencanaan Kota, Hubungan Internasional dan Teknologi. Dengan mengusung 4 nilai yaitu Keberlanjutan. Konektivitas, Kreativitas dan Keterpaduan Sosial. Indikator Prinsip Keberlanjutan menurut

Pemerintah Kota Semarang melingkupi Kepadatan Penduduk yang Sesuai, Pertumbuhan Penduduk yang Teratur, Hemat Energi dan Ketersediaan Ruang Publik untuk kreativitas, kebugaran dan daerah resapan air.

Prinsip Konektivitas meliputi Mobilitas yang efisien, Ramah untuk Pejalan Kaki, Komunikasi, dan terciptanya hubungan internasional berupa kerja sama, kegiatan kerelawanan, dan interaksi budaya.

Prinsip Kreativitas meliputi Aktivitas kreatif seperti bedah buku, pertunjukan musik, inkubasi UMKM dan startup. Sektor Swasta. Mempunyai Wadah untuk menyalurkan bakat dan pengembangan teknologi sesuai dengan zamannya.

Prinsip keterpaduan sosial meliputi implementasi nilai nilai demokrasi dalam berkomunitas dan berorganisasi, mengedepankan musyawarah, bersih dan aman, semangat masyarakat untuk berkontribusi sesuai minat dan bakatnya serta keanekaragaman.

Alasan pengambilan topik penelitian ini adalah penulis tertarik dengan kesadaran para pemimpin daerah yang mulai memabangun kota-kotanya lebih dekat dengan nilai-nilai humanis, keberlanjutan, ramah lingkungan serta memperhatikan keterpaduan sosial yang tertuang dalam gagasan smart city. Pelayanan administratif yang lancer saja tidak menentukan apakah kota tersebut nyaman ditinggali manusia.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fakta dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas akan dibahas dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Semarang Smart City?

1.3. Tujuan Penelitian

Pembahasan masalah yang akan disajikan oleh penulis tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan terkait Implementasi Semarang Smart City (SSC)
2. Untuk mengetahui sejauh mana jangkauan perubahan yang diinginkan dari implementasi Semarang Smart City.
3. Untuk mendeskripsikan pelaksana program/kebijakan Semarang Smart City (SSC)
4. Untuk mendeskripsikan sumber daya yang tersedia dalam proses implementasi Kebijakan Semarang Smart City (SSC)
5. Untuk mengetahui kepentingan yang dipengaruhi dengan adanya Semarang Smart City.
6. Untuk mengetahui kedudukan pengambil keputusan Implementasi Semarang Smart City.
7. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Semarang Smart City.
8. Untuk mendeskripsikan karakteristik lembaga dan penguasa dalam implementasi Semarang Smart City.

1.3. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini dapat mencapai manfaat diantaranya untuk:

1.3.1. Kegunaan Teoritis

Menjadi referensi di masa datang khususnya mengenai kebijakan publik secara umum dan smart city secara spesifik.

1.3.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi kota Semarang maupun kota-kota lain yang mengusung konsep smart city dalam proses pelayanan maupun kebijakan publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin berkembang di era modern

1.4. Kajian Dasar Teori.

1.4.1. Teori Implementasi

a. Konsep Implementasi:

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-

usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan

dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008:203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard

Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan

dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan Semarang Smart City secara lebih mendalam.

b. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie”

yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

1.4.2. Pengertian Kebijakan Publik.

Definisi yang terkenal mengenai kebijakan publik dicetuskan oleh Dye adalah *whatever government choose to do or not to do*. Maksudnya adalah sesuatu

yang dilakukan pemerintah maupun tidak dilakukan adalah kebijakan publik.⁷

Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan tidak dimaksudkan menggantikan politik—membangun elite teknokratis.

Mengikuti Dunn, metode analisis kebijakan menggabungkan *lima prosedur umum* yang umum dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu Definisi: Menghasilkan informasi-informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

1. Prediksi: Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
2. Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang.
3. Deskripsi: Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari di terapkannya alternatif kebijakan.

Woodrow Wilson berpendapat when politics end, administration begin, maksud dari kredo diatas adalah masih banyak politikus yang belum bersedia mengurangi ego politiknya dengan memaksimalkan kebijakan publik. Memang sebagaimana dikemukakan oleh Hank C. Jenkins-Smith (1990), analisis kebijakan mengerosi politik popularisme. Pemain-pemain politik di lapangan khususnya negara berkembang –dimana politik berproses dengan keras, kasar, dan kejam –

⁷ Bangun, Gary Ekatama, 2018. Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City dalam Mewujudkan Mobilitas Cerdas. Universitas Sumatra Utara

dan para cerdas pandai (atau yang mempunyai modal intelektual) yang cenderung keluar dari politik adalah mereka yang berintelektualitas terbatas.⁸

Dari Ilmuwan Amerika, ada baiknya menyimak pemikiran ahli kebijakan publik Indonesia. Pertama, A.G Subarsono (2005) yang merumuskan proses analisis kebijakan dalam sekuensi (1) perumusan masalah, (2)*forecasting*, (3) pengembangan alternatif kebijakan dan (4) rekomendasi kebijakan.

1.4.3. Hubungan antara Politik, Kebijakan publik, dan Demokrasi

Premis utamanya adalah bahwa politik menentukan pembangunan, kemiskinan dapat dihilangkan jika politik pro pada penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dapat berjalan dengan baik jika semua orang punya hak untuk menentukan arah politik. Jakoeb Oetama, pada sambutan peluncuran buku Fadel Muhammad, *Reinventing Pemerintah Daerah*, pertengahan Agustus 2008, mengemukakan:

“Demokrasi kita hingga sekarang baru mencapai demokrasi parlemen, demokrasi *pale*, demokrasi yang baru *omong doang*. Baru di tahap *talking democracy*, kita perlu meningkatkan pada *working democracy*.”

Menurut Dr. Riant Nugroho, dalam bukunya *Public Policy*, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang “dalam” namun “kebijakan publik” yang miskin. Produk demokrasi yang baik adalah kebijakan publik yang unggul. Dan bentuk terluar dari demokrasi dan kebijakan publik adalah pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, atau *good governance*.

Pernyataan dari setiap pemegang kekuasaan senantiasa “mengendalikan negara”. Pernyataan ini tentu sudah tidak relevan. Pernyataan yang lebih relevan adalah “memanajemeni negara” Memanajemen artinya mengendalikan dan

⁸ Nugroho, Riant,, 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Gramedia.

membuatnya lebih bernilai, yang berarti upaya untuk melakukan *value creation*. Menurut Petter F Drucker Negara berkembang bukan negara yang sedang berkembang tetapi negara yang tidak dimenejemeni dengan baik.

Pertumbuhan daerah otonom yang luar biasa menimbulkan biaya pengelolaan negara yang amat mahal karena jumlah bupati atau wali kota dan wakilnya serta aparatya bertambah secara eksponensial. Anggaran yang seharusnya untuk pembangunan sebagian diserap untuk gaji aparat pemerintah.⁹

1.4.4. Tantangan Kebijakan Publik Terkini.

Korupsi dan konglomerat hitam adalah akibat kebijakan publik yang membuat korupsi mudah dan “halal” dilakukan; dari kebijakan publik yang membiarkan kolusi antara kekuasaan dan kekayaan, yang membuat pengusaha dengan mudah “membeli” lisensi, fasilitas dan monopoli.¹⁰ Menurut Dr Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy Mengapa pembaruan politik tidak berhasil memperbaiki kehidupan secara signifikan?* Karena, politik diperlukan, i yang lebih diperlukan adalah pembaruan kebijakan publik. Premis yang dikembangkan adalah, politik seunggul apapun, tidak memadai lagi, karena yang diperlukan adalah kebijakan yang unggul. Sehebat apapun demokrasi yang dihasilkan dari suatu system politik, tetapi jika sitem politik yang demokratis itu-tidak mampu mengembangkan kebijakan-kebijakan politik yang unggul, tidak ada gunanya.

Amerika Serikat menjadi adidaya karena bangunan negara di tata dengan kebijakan publik yang mengantisipasi ke masa depan, dengan membangun keunggulan kompetitif disegala sisi, sementara Uni Soviet porak-poranda karena kebijakan publik yang sentralistik tidak mampu menjawab tantangan negara.

⁹ Nugroho, Riant,, 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Gramedia. hlm 14

¹⁰ ¹⁰ ^3 Ibid., hlm. 18

Singapura dan Jepang maju karena terbiasa berpikir 25 tahun ke depan. Salah satu ukurannya adalah rendahnya tingkat persepsi korupsi di negara-negara tersebut. Dengan demikian, kualitas manusia yang ada mampu mengelola aspirasi publik dengan efektif.

Pada akhirnya, bentuk ‘‘top down’’ adalah bentuk formalnya, tetapi bentuk operasionalnya tetap ‘‘bottom to up.’’ Ketiga, proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik seakan berjalan dengan sendirinya (It goes without saying). Melembaganya proses ini merupakan bentuk kedewasaan bernegara dari rakyat dan pemerintahan dari negara-negara di kawasan tersebut. Proses ini diwadahi dalam mekanisme demokrasi, mekanisme hukum, mekanisme sosial, mekanisme bisnis hingga mekanisme melalui media massa, disamping tingkat tingginya perkembangan budaya politik dan komunitas politik. Penyebab utama visi yang gagal adalah tidak cukup terdapat kebijakan-kebijakan publik yang unggul¹¹ Dari fakta ini, nyata bahwa krisis yang dialami Indonesia dan belum dapat pulih hingga hari ini karena kekeliruan yang dibuat oleh organisasi publiknya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

a. dinamika kebijakan publik

Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia. Kebijakan publik senantiasa berinteraksi dengan dinamika kondisi politik, ekonomi, sosial dan kultural tempat kebijakan itu eksis. Dinamika merupakan bagian wajar dari kebijakan publik. Namun, hal yang perlu dicermati, kebijakan publik bukanlah bagian dari politik semata. Jika kebijakan publik menjadi bagian politik saja, kebijakan publik menjadi bagian dari kekuasaan

¹¹ ^4 Ibid., hlm. 37

kebijakan publik menjadi bagian dari selera kekuasaan. Maka yang terjadi adalah ‘nama’nya bukan ‘kebijakan publik’ tetapi kebijakan penguasa.¹²

Kebijakan publik merupakan cerminan dari interaksi politik, ekonomi, sosial dan kultural. Misalnya Politik Demokratis memberikan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokratis dan dilandaskan atas kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sampai disini kita mempunyai premis, pada dasarnya setiap negara memiliki masalah yang sama, yang membedakan adalah responnya.

b. Kualitas pembangunan sumber daya manusia dan hubungannya dengan organisasi publik yang efisien.

Secara komparatif dapat dilihat bahwa di negara-negara maju di kawasan Asia, salah satu kunci keberhasilannya adalah karena mereka mempunyai organisasi publik yang efisien. Sementara itu, negara yang berkembang dicirikan rendahnya kinerja organisasi publik yang gagal memberikan informasi, data, ataupun alternatif yang baik dan memadai sebagai salah satu komponen data untuk memformulasikan kebijakan publik yang baik, dengan konsekuensi kebijakan publik yang dihasilkan juga tidak ‘kelas satu.’

Dalam konteks yang sama ada beberapa hubungan yang erat antara organisasi publik. Rasanya relevan untuk mengedepankan isu *good governance*. Studi dari Booz Allen dan Hamilton menemukan fakta Indonesia adalah negara dengan tingkat *good governance* paling rendah diantara negara tetangganya. Indeks Good Governance Indonesia adalah 2,8 sementara Singapura 8,9, Malaysia 7,7, Thailand 4,8 dan Filipina 3,47.

¹² ^5 Ibid., hlm. 52

Ditingkat paling atas, perubahan dalam kabinet, khususnya dalam perubahan, penambahan, dan penghapusan departemen, kementerian dan badan yang tidak sepenuhnya mengacu pada kaidah-kaidah manajemen, yakni pertama kali mempertanyakan apakah tindakan tersebut memiliki misi-jikapun ada apakah misinya melayani kepentingan publik- dan apakah perubahan-perubahan tersebut tidak memakan biaya besar dan keuntungan yang dihasilkan minimal, misalnya, penggantian nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional, dengan misi yang sama akan memakan anggaran baru mulai percetakan kertas kop dari tingkat pusat hingga sekolah dasar seluruh negeri.¹³ Perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang disebutkan diatas seolah perubahan bentuk tanpa ada pengaruh substansial. Ibarat jalan ditempat, bukan untuk tujuan yang substansial. Eko Prasodjo, Guru Besar Administrasi Publik UI (*Kompas* 24 April 2007) menemukan ada 1.850 peraturan yang tumpang tindih dan 388 jenis pelayanan yang tumpang tindih.

c. reformasi perkotaan

Dalam buku *What's Wrong With Planning* (2002), Rick Bishop mengeluarkan seluruh keprihatinan dan kerisauannya mencermati berbagai kemencengan, kesalahan, dan kekeliruan dalam pengelolaan kota. Hampir semua orang bicara mengenai pendekatan system, tentang kemitraan, keterbukaan, pemberdayaan masyarakat, tata pemerintah yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), akuntabilitas, keberlanjutan pembangunan namun banyak kota yang disusun tanpa visi yang jelas, tidak secara tajam mengungkap potensi unggulan maupun tantangan yang dihadapi masing masing kota.

¹³ ^5 Ibid., hlm. 58

Akibatnya pembangunan kota lantas bersifat sporadis, model pembangunan kota semacam ini sangat berbahaya bagi kota-kota kita. Untuk mencegah musibah itu agar tidak terjadi, kirannya dalam proses pembangunan kota, kita mesti *back to basic* dengan ABCDE-nya perencanaan kota yang berlandaskan prinsip keberlanjutan. Prinsip dasar ABCDE adalah akronim (Action for Better Cities by Developing E's; Employment, Environment, Engagement, Enforcement, Enjoyment, ditambah Equity, Energy Conservation dan Estetika Lingkungan.¹⁴

Bencana banjir yang menimpa kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Semarang, bukanlah peristiwa yang mengejutkan. Sudah sejak beberapa tahun silam dikumandangkan fenomena ‘bunuh diri ekologis’ (ecological suicide) dan bunuh diri perkotaan ‘(Urbicide atau urban suicide). Disebut bunuh diri karena tokoh-tokoh yang notabene dipercaya rakyat mengelola kota justru ‘melukai’ dan ‘membunuh’ kotanya dengan aneka kebijakan yang merusak keseimbangan alam-manusia-lingkungan.¹⁵

Tak ada salahnya kita belajar dari keberhasilan pengelolaan dan pembangunan kota-kota lain, khususnya yang termasuk fenomenal seperti Curitiba di Brasilia. Wheeler dan Beatley dalam buku *The Sustainable Urban Development* (2004) berkisah tentang Curitiba yang disebut sebagai One of the world's leading examples of creative urban development. Curitiba adalah kota metropolitan yang tumbuh dengan amat pesat, menghadapi masalah yang tak banyak bedanya dengan yang di hadapi masyarakat Jakarta. Pemukiman kumuh, pengangguran, kemacetan lalu lintas, menggunungnya sampah, banjir, dan pembusukan lingkungan. Namun, sejak Jaime Lerner menjadi wali kota tahun

¹⁴ Budhihardjo, Eko. 1999. *Kota Berkelanjutan: Penerbit Alumni*

¹⁵ Budhihardjo, Eko. 2014. *Revolusi Perkotaan: Kompas Gramedia*

1971 dan dibantu Jonas Rabinovitch dan Josef Leitman merencanakan kota dengan sangat visioner, terjadilah perubahan yang drastis.

Filosofinya sederhana, berupa Trilogi: inovasi bersama penduduk, merancang bersahabat dengan alam, dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Filosofi tersebut diterjemahkan menjadi kenyataan melalui berbagai bentuk kebijakan dan insentif sehingga segenap warga melaksanakannya dengan sepenuh hati, bahkan membudaya sebagai perilaku positif. Penduduk mengumpulkan sampah, ditukarkan karcis bus atau kupon makanan.

Kendaraan pribadi ditinggal karena transportasi umum lebih menyenangkan. Sungai-sungai sumber banjir ditata menjadi taman menjadi taman, dilengkapi danau buatan penampung banjir dengan *flood control* yang terpadu. Taman-taman diciptakan dari lahan-lahan terlantar yang diakuisisi pemerintah. Ketentuan mengenai building coverage (perbandingan tanah yang tertutup bangunan dan tanah yang tidak tertutup bangunan untuk resapan air) diterapkan tanpa kompromi dan aturan tegas. Prinsip Polycentric atau multiple centres dikembangkan dengan terpadu dengan sistem transportasi publik. Membiasakan kebiasaan baik. Bukan menganggap baik hal buruk yang sudah biasa.

Dalam buku terbarunya *East Asia Modern Shaping the Contemporary City* (2015), Peter G Rowe menohok kecenderungan anomali pada kota-kota di Asia tenggara yang tampak kian modern namun kian memperlebar jurang kesenjangan, menyuburkan individualisme, meretakan kohesi sosial, meningkatkan *environmental stress*, memperparah pencemaran air, tanah dan udara, memboroskan energi, menumbuhkan kriminalitas sehingga tidak nyaman untuk kehidupan. Sudah sejak beberapa tahun silam John Ormsbee Simonds menyampaikan, taman, lapangan olahraga, ruang terbuka, tempat bermain

merupakan urban paradise alias surge perkotaan (Earthscape,1986) Dikisahkan, bila orang sudah merasa jenuh, sumpek, bosan, melepas napas, mendengarkan gemericik air dan kicauan burung dikawasan yang disebut surge perkotaan itu.

Ternyata di Eropa Barat berkembang ketidakpuasan yang menuntut porsi pelibatan rakyat lebih besar dalam pembangunan kotanya. Mereka kecewa dengan pembangunan kota yang serba deterministik, tertutup, melupakan kepentingan manula, disabilitas, kelompok marjinal dan kurang tanggap pada diversifikasi sosial. Saya kutip sesuai aslinya, *Sociopolis is setting new standards by realizing a dream of social balance, where people potentially have the same opportunities (Sociopolis:Project for a City of the Future,2004)* yang maknanya berarti Sociopolis adalah tatanan baru yang dilandasi keinginan untuk mencapai keseimbangan sosial, yang mana semua orang berpotensi untuk memiliki kesempatan yang sama.

Musibah banjir bandang yang menimpa kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Manado, hingga kota kecil di pelosok Nusantara, segenap pihak mesti mawas diri. Tidak hanya pejabat yang mesti merasa malu, tetapi juga para pengembang, wakil rakyat, ilmuwan, dan para peneliti dari kampus, serta para arsitek dan planolog yang berkontribusi dalam pembangunan wilayah dan kota yang tidak ramah. Kehendak politik yang kuat untuk sesegera mungkin melaksanakannya sesuai rencana. Konsep dan rencana tanpa tindakan sama saja dengan mimpi di siang bolong, sedangkan tindakan tanpa konsep dan rencana yang matang adalah mimpi buruk.¹⁶

Konsep Smart City.

¹⁶ ^2 Ibid., hlm. 31

Smart city atau yang biasa diartikan sebagai kota pintar merupakan topik yang cukup penting akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia, urbanisasi yang terjadi menjadi penyebab daerah perkotaan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Pada tahun 2014 saja populasi 54% total populasi global disumbang populasi di perkotaan, bertambah 34% dari total populasi pada tahun 1960, dan terus tumbuh. Pada 2017 terdapat survey yang mengatakan mayoritas penduduk akan tinggal di perkotaan (Global Health Observatory). Survey menunjukkan jumlah urbanisasi akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang juga mengalami peningkatan akan menambah 2.5 miliar orang ke populasi perkotaan pada 2050, Asia dan Afrika mengalami peningkatan hampir 90% (Dameri 2017:44).

Internet yang berkembang pesat dengan fitur World Wide Web adalah hal yang mempengaruhi perkembangan konsep Smart City di beberapa kota di negara maju. Penggunaan internet pada mulanya terbatas pada akademisi dan pemerintahan, perkembangannya yang begitu pesat sehingga mulai dipakai oleh banyak pihak lalu berkembang menjadi media komunikasi dan transaksi masal yang mempengaruhi aspek kehidupan. (Coe et al.2001.2). Dalam literatur ilmiah dan kebijakan internasional konsep kota cerdas menjadi semakin populer.

Definisi Smart City salah satunya adalah *“A smart city is a city well performing in a forward-looking way in the six characteristic, built on the “smart” combination of self-decisive, Independent and aware citizens”* (Giffinger et al 2017:11). Makna dari definisi di atas adalah Smart City adalah kota yang memiliki kinerja yang baik mempunyai misi visioner berorientasi ke masa depan dalam ekonomi, sosial, pemerintahan, transportasi, lingkungan dan

kehidupan, dibangun diatas kombinasi cerdas dari aktivitas warga yang mandiri dan berkesadaran.

Terdapat banyak defenisi dari Smart City dalam kajian beberapa literature, dimana penyajian defenisi menyoroti aspek dari sudut yang berbeda-beda, diantaranya : Menurut Washburn, D., dkk, Smart City di defenisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota, seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi dan keperluan kota lainnya, dimana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan dan efisien ¹⁷

Menurut Giffinger, R., dkk, Smart City merupakan sebuah kota yang terdepan di dalam perekonomian, sumber daya manusia, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan masyarakat, yang mana keseluruhan dibangun secara cerdas, independen dan memiliki kesadaran dari masyarakatnya. ¹⁸

Sedangkan menurut Hall, R. E., Smart City adalah sebuah kota yang memonitor dan mengintegrasikan kondisi semua infrastrukturnya, termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, bahkan seluruh bangunan pemerintahan sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya, rencana kegiatan dan memantau keamanan sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada warganya¹⁹

Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N. M., & Nelson, L. E. (2010). Helping CIOs Understand Smart City Initiatives: Defining the Smart City,

¹⁸ Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. Available at eu/download/smart_cities_final_report.pdf.

Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28). Available at oyp82/webviewable/pdf.

Adapun dalam definisi Nijkamp, dkk, Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (Information and Communication Technology) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.²⁰

Dari beberapa literature dapat diartikan Smart City sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energy, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersynergy-nya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota.

Konsep dan Elemen Smart City Berkembangnya konsep Smart City, menimbulkan pemahaman terhadap konsep Smart City yang beragam dan belum jelas atau konsisten. Kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju Smart City diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial, pada masalah-masalah prioritas. Sebagai contoh, Kota Amsterdam yang mendasarkan penggunaan TIK untuk

²⁰Caragliu, A; Del Bo, C. & Nijkamp, P (2011). Smart cities in Europe, Journal of Urban Technology,70. es_journal_of_urban_technology_2015_aom_etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../s_chapter1.pdf Makalah Kuliah Tamu dengan Tema : Menuju Konsep Smart City 8.

mengurangi polusi, atau Kota Tallin, sebagai ibukota Estonia yang memulai pengelolaan kota yang cerdas dari segi pemerintahannya dengan e-government dan menggunakan smart ID card dalam pelayanan bagi penduduknya, maupun Kota Songdo di Korea Selatan yang mendasarkan pengembangan kota berbasis TIK untuk mengembangkan Songdo sebagai pusat bisnis internasional.

Adapun contoh di Indonesia beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang dan Semarang memiliki masalah pertumbuhan penduduk yang signifikan, kemacetan, penumpukan sampah dan masalah kependudukan lainnya yang memerlukan pemecahan masalah yang tepat. Berkat sentuhan teknologi beberapa kota besar tersebut mulai mengarah kepada penerapan konsep Smart City, yakni dengan lahirnya e-government, e-procurement, e-budgeting, e-delivery, e-controlling, dan e-monitoring.

Dapat diambil garis besar dari mengartikan Konsep Smart City sebagai konsep yang telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang dengan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini pada akhirnya tidak hanya mendasarkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional. Dibeberapa literatur penelitian lainnya terkait dimensi dalam konsep Smart City juga merujuk pada ke tiga dimensi tersebut, yaitu :²¹

1. Dimensi teknologi, diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat

²¹ Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28). Available at oyxp82/webviewable/pdf.

mobilitas tinggi dan jaringan komputer yang memadai. 2. Dimensi Sumber Daya Manusia, diperlukan kreatifitas, pengetahuan, pendidikan dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, dimana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model system digital melalui kreatifitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. 3. Dimensi Institusional, diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, dimana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah, dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Selain ketiga dimensi tersebut, terdapat juga elemen utama dalam Smart City yakni infrastruktur, modal, aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan. Dan level dari penerapan Smart City terbagi dalam 6 level, diantaranya 1. Level 0, merupakan level awal dari pengimplementasian konsep Smart City, level ini ditandai dengan masih kota biasa namun terdapat potensi menjadi Smart City. 2. Level 1, merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi Smart City, ditandai dengan tersedia internet secara menyeluruh di wilayah kota. 3. Level 2, merupakan tahap kelanjutan dari level pertama, dimana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya atau telah menerapkan konsep Metropolitan Area Network (MAN). 4. Level 3, merupakan level open information, dimana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara online. 5. Level 4, merupakan level yang telah memiliki proses mengolahan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data

dan informasinya. 6. Level 5, merupakan integrasi yang baik di dalam maupun antar kota sebagai kombinasi level 2,3 dan 4. Untuk mendukung suatu kota dalam menuju level ke lima diatas, maka diperlukannya stakeholders yang perlu dilibatkan dalam pengembangan konsep Smart City, antara lain : Government, Academician, Citizen/civil community, Developers, Media dan Private sectors. Keseluruhan stakeholders tersebut memiliki peranan masing-masing dalam mengimplementasikan konsep Smart City. Sebagai ilustrasi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem kota pintar yang terintegrasi.

Akademisi memberikan sumbangan saran kebijakan berdasarkan riset dan penelitian yang mereka lakukan. Developer membuat aplikasi yang memanfaatkan teknologi. Media mempromosikan dan mensosialisasikan semua program. Pihak swasta mendukung dengan modal, dan komunitas serta masyarakat turut berpartisipasi dengan mengubah kebiasaan lama yang buruk dan mempraktikkan yang baru. Jika salah satu pihak tidak berkontribusi, maka konsep ini tidak akan berjalan dengan baik²²

Langkah Strategis Keberhasilan Beberapa Kota Menuju Konsep Smart City Keberhasilan penerapan menuju kota cerdas seperti Surabaya dalam pembangunan dan pengelolaan kota yang lebih cerdas dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia maupun Semarang yang dalam Smart City Expo World Congress sebagai finalis World Smart City Tentunya keberhasilan tersebut memiliki indikator tolak ukur tersendiri, diantaranya : smart living, environment (lingkungan), utility (utilitas/prasarana), economy (ekonomi), mobility (mobilitas), people (manusia, masyarakat). Keenam konsep kota cerdas ini dapat

²² Mursalim, Widhoretno Siti. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota *Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi.

dikembangkan berdasarkan kriteria dan karakteristik kebutuhan penduduk perkotaan, yang tidak sama antara kota yang satu dengan yang lainnya.

1.5. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah²³.

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini menurut Sugiyono, yaitu:

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini menurut Sugiyono, yaitu:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.”
(Sugiyono,2007:11)²⁴

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku literature serta dokumen yang terkait dengan smart city. Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis

²³ Moleong. J. Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

²⁴ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*.

data dari Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data.

Penyajian data. Penyajian data adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, flowchart dan lain sebagainya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.

1.5.2. Triangulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keakuratan dan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai alat untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.²⁵ Penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data dan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dengan bertanya secara langsung kepada informan yang memiliki data lengkap mengenai Semarang Smart City.

Definisi Triangulasi menurut Norman K Denkin adalah Kombinasi atau gabungan berbagai macam metode untuk mengkaji fenomena terkait dari berbagai sudut pandang. Menurutnya triangulasi meliputi 4 hal yaitu: (1) triangulasi metode . (2) triangulasi antar peneliti. (3) triangulasi sumber data,

²⁵ ^2 Ibidl. Hal 131

(4) triangulasi teori. Dalam penelitian ini mengkombinasikan 2 triangulasi yang terdiri dari triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

- a. Triangulasi antar metode dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan survei. Dengan berbagai cara yang berbeda ini diharapkan dapat menjadikan dan membandingkan informasi yang diperoleh. Sehingga diperoleh informasi yang utuh.
- b. Triangulasi sumber data. Dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu informan yaitu Kepala Sarana dan Prasarana Telekomunikasi serta Kepala Sub Bagian umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. Pada penelitian ini juga menggunakan dokumen tertulis, arsip, gambar serta foto.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Dalam bab ini berisi gambaran umum geografis dan demografis Kota Semarang..

BAB III

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan analisis data,serta hasil pembahasan penelitian.

BAB VI.

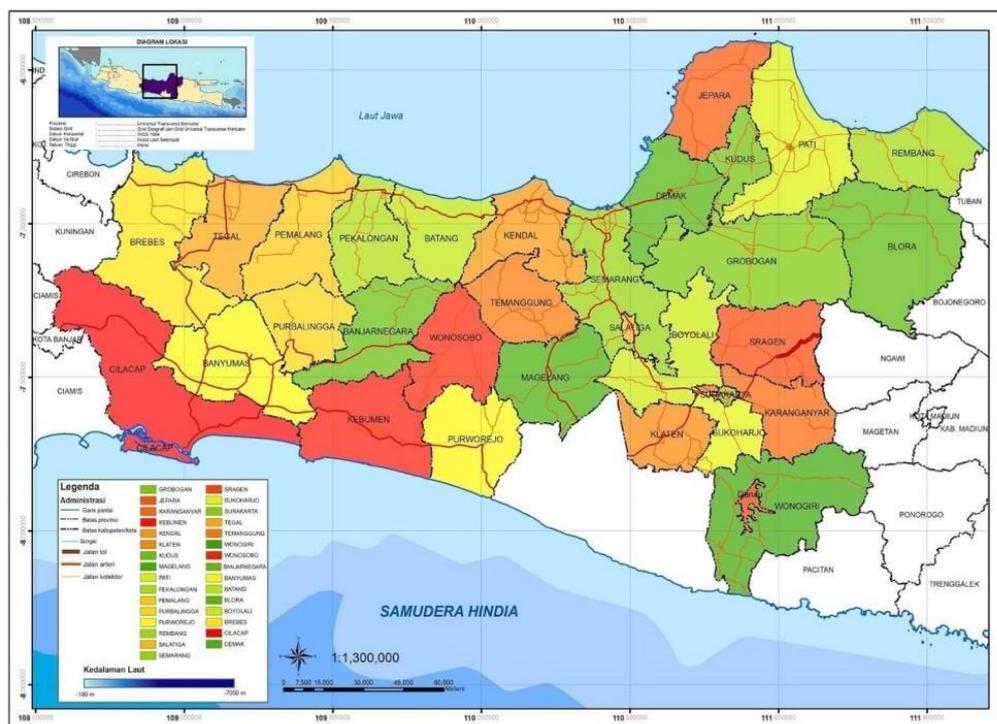
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang kesimpulan,keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Kondisi geografis kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1. Peta Kota Semarang
(Sumber: Bappeda Kota Semarang)

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota Metropolitan

yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis 6°50’–7°10’ Lintang Selatan dan garis 109°35’–110°50’ Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75–3,5 meter diatas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur – Lintang	Batas Wilayah
Sebelah Utara	6 ⁰ 50 ‘ LS	Laut Jawa

Sebelah Selatan	$7^{\circ} 10' \text{ LS}$	Kab. Semarang
Sebelah Barat	$109^{\circ} 50' \text{ BT}$	Kab. Kendal
Sebelah Timur	$110^{\circ} 35' \text{ BT}$	Kab. Demak

Sumber : semarangkota.bps.go.id

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

2.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km².

Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 6,14 km². Kecamatan terkecil ini merupakan daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian atau bisnis kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan bersejarah, seperti; Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama” Semarang. Tabel 2.2 berikut ini membandingkan luas wilayah Kota Semarang dan luas masing-masing per kecamatan yang ada di Kota Semarang:

Tabel 2.2. Perbandingan Luas Wilayah di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase
1.	Mijen	57,55	15,4
2.	Gunungpati	54,11	14,47
3.	Banyumanik	25,69	6,87
4.	Gajah Mungkur	9,07	2,42
5.	Semarang Selatan	5,93	1,58
6.	Candisari	6,54	1,75
7.	Tembalang	44,20	11,83
8.	Pedurungan	20,72	5,54
9.	Genuk	27,39	7,32
10.	Gayamsari	6,18	1,65
11.	Semarang Timur	7,70	2,06
12.	Semarang Utara	10,97	2,93
13.	Semarang Tengah	6,14	1,64
14.	Semarang Barat	21,74	5,81

15.	Tugu	31,78	8,5
16.	Ngaliyan	37,99	10,16
	JUMLAH	373,7	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa luas wilayah pada masing- masing kecamatan di Kota Semarang berbeda-beda. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Semarang adalah Kecamatan Mijen dengan presentase mencapai 15,4%, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah kecamatan Semarang Selatan dengan presentase hanya mencapai 1,64%.

2.3. Kependudukan

Penduduk kota Semarang menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2016 adalah 1.602.717 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Semarang menduduki peringkat ke-5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan, berikut data tentang peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang selama 4 tahun terakhir:

Tabel 2.3. Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2013 – 2016

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Presentase Peningkatan
1.	2013	1.741.824	-
2.	2014	1.761.414	1,12
3.	2015	1.776.618	0,86

4.	2016	1.780.396	0,21	<i>Sumber:</i>
				<i>Data</i>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 2.3, diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 dengan presentase sebesar 1,12%. Pada tahun berikutnya, yaitu 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 0,86% dan pada tahun 2015 ke tahun 2016 hanya terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,21%.

Penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan belum merata, seperti yang terjadi di Kecamatan Pedurungan yang tercatat sebagai wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Tugu yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah. Berikut penulis sajikan jumlah penduduk kepadatan penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan yang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016, dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Penyebaran Penduduk Kota Semarang Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Presentase
	L	P	L+P	
Mijen	31,937	31,411	63,348	3,95
Gunungpati	40,083	39,901	79,984	4,99
Banyumanik	65,668	67,821	133,489	8,32
Gajahmungkur	31,880	31,886	63,766	3,97

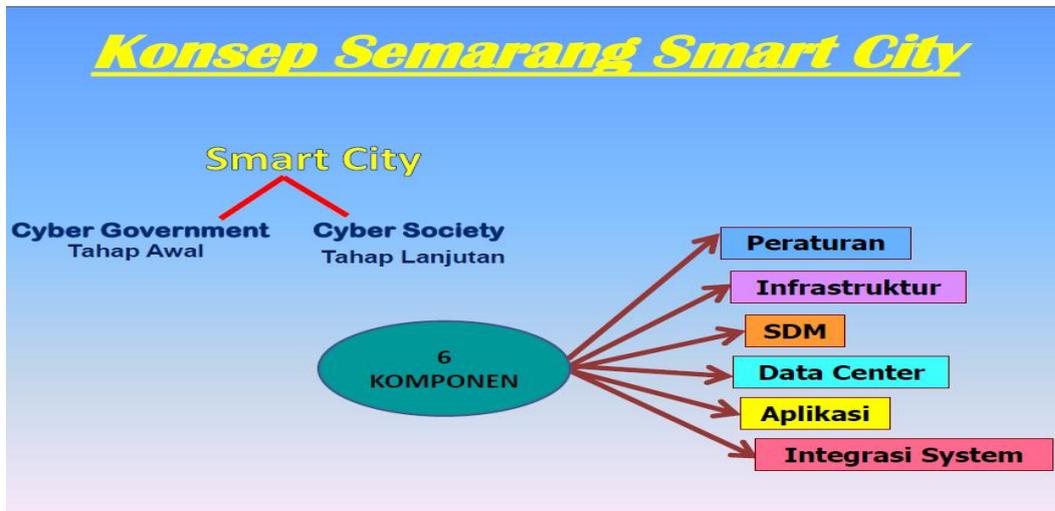
Semarang selatan	39,088	40,074	79,162	4,93
Candisari	39,143	39,720	78,863	4,92
Tembalang	80,542	78,524	159,066	9,92
Pedurungan	89,706	91,923	181,629	11,33
Genuk	50,149	49,359	99,508	6,2
Gayamsari	37,413	36,709	74,122	4,62
Semarang Timur	37,751	38,857	76,608	4,77
Semarang Utara	61,819	65,313	127,132	7,93
Semarang Tengah	34,137	35,574	69,711	4,34
Semarang Barat	78,336	79,218	157,554	9,83
Tugu	15,986	16,055	32,041	1,99
Ngaliyan	63,229	63,505	126,734	7,9
	Jumlah		1,602,717	100

Sumber: Laporan Bulanan Kependudukan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2016, diolah, 2016

Berdasarkan tabel 2.4, dapat diketahui bahwa pada penyebaran penduduk pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang belum merata, masing-masing memiliki tingkat kepadatan tersendiri dengan perbedaan yang cukup mencolok. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa kawasan dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pedurungan dengan angka mencapai 11,33%, sedangkan kawasan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tugu dengan angka hanya sebesar 1,99%.

2.2. Gambaran Umum Semarang Smart City.

Gambar 2.2 Konsep Semarang Smart City.



Su
mber:
Dokume
n
Bappeda
Kota
Semaran
g.

Defenisi Smart City

Terdapat banyak defenisi dari Smart City dalam kajian beberapa literature, dimana penyajian defenisi menyoroti aspek dari sudut yang berbeda-beda, diantaranya : Menurut Washburn, D., dkk, Smart City di defenisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota, seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi dan keperluan kota lainnya, dimana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan dan efisien ²⁶

Menurut Giffinger, R., dkk, Smart City merupakan sebuah kota yang terdepan di dalam perekonomian, sumber daya manusia, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan masyarakat, yang mana keseluruhan dibangun secara cerdas, independen dan memiliki kesadaran dari masyarakatnya.²⁷

Sedangkan menurut Hall, R. E., Smart City adalah sebuah kota yang memonitor dan mengintegrasikan kondisi semua infrastrukturnya, termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel,

²⁶ Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N. M., & Nelson, L. E. (2010). Helping CIOs Understand Smart City Initiatives: Defining the Smart City,

²⁷ Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. Available at eu/download/smart_cities_final_report.pdf.

kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, bahkan seluruh bangunan pemerintahan sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya, rencana kegiatan dan memantau keamanan sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada warganya²⁸

Adapun dalam definisi Nijkamp, dkk, Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (Information and Communication Technology) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.²⁹

Dari beberapa literature dapat diartikan Smart City sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energy, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersynergy-nya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota.

Konsep dan Elemen Smart City Berkembangnya konsep Smart City, menimbulkan pemahaman terhadap konsep Smart City yang beragam dan belum jelas atau konsisten. Kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju Smart City diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial, pada masalah-masalah prioritas. Sebagai contoh, Kota Amsterdam yang mendasarkan penggunaan TIK untuk mengurangi polusi, atau

²⁸ Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28). Available at oyxp82/webviewable/pdf.

²⁹ Caragliu, A; Del Bo, C. & Nijkamp, P (2011). Smart cities in Europe, Journal of UrbanTechnology,70es_journal_of_urban_technology_2015_aom_etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../s

Kota Tallim, sebagai ibukota Estonia yang memulai pengelolaan kota yang cerdas dari segi pemerintahannya dengan e-government dan menggunakan smart ID card dalam pelayanan bagi penduduknya, maupun Kota Songdo di Korea Selatan yang mendasarkan pengembangan kota berbasis TIK untuk mengembangkan Songdo sebagai pusat bisnis internasional.

Adapun contoh di Indonesia beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang dan Semarang memiliki masalah pertumbuhan penduduk yang signifikan, kemacetan, penumpukan sampah dan masalah kependudukan lainnya yang memerlukan pemecahan masalah yang tepat. Berkat sentuhan teknologi beberapa kota besar tersebut mulai mengarah kepada penerapan konsep Smart City, yakni dengan lahirnya e-government, e-procurement, e-budgeting, e-delivery, e-controlling, dan e-monitoring.

Dapat diambil garis besar dari mengartikan Konsep Smart City sebagai konsep yang telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang dengan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini pada akhirnya tidak hanya mendasarkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional. Dibeberapa literatur penelitian lainnya terkait dimensi dalam konsep Smart City juga merujuk pada ke tiga dimensi tersebut, yaitu :³⁰

1. Dimensi teknologi, diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi dan jaringan komputer yang memadai.
2. Dimensi Sumber Daya Manusia, diperlukan kreatifitas, pengetahuan, pendidikan dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang

³⁰ ³⁰ Mursalim, Widhoretno Siti. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota *Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi.

cerdas, dimana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model system digital melalui kratifitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. 3. Dimensi Institusional, diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, dimana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah, dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Selain ketiga dimensi tersebut, terdapat juga elemen utama dalam Smart City yakni infrastruktur, modal, aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan. Dan level dari penerapan Smart City terbagi dalam 6 level, diantaranya 1. Level 0, merupakan level awal dari pengimplementasian konsep Smart City, level ini ditandai dengan masih kota biasa namun terdapat potensi menjadi Smart City. 2. Level 1, merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi Smart City, ditandai dengan tersedia internet secara menyeluruh di wilayah kota. 3. Level 2, merupakan tahap kelanjutan dari level pertama, dimana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya atau telah menerapkan konsep Metropolitan Area Network (MAN). 4. Level 3, merupakan level open information, dimana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara online. 5. Level 4, merupakan level yang telah memiliki proses mengolahan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya. 6. Level 5, merupakan integrasi yang baik di dalam maupun antar kota sebagai kombinasi level 2,3 dan 4. Untuk mendukung suatu kota dalam menuju level ke lima diatas, maka diperlukannya stakeholders yang perlu dilibatkan dalam pengembangan konsep Smart City, antara lain : Government, Academician, Citizen/civil community, Developers, Media dan Private sectors. Keseluruhan stakeholders tersebut memiliki peranan masing-masing dalam mengimplementasikan konsep Smart City.

Sebagai ilustrasi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem kota pintar yang terintegrasi.

Akademisi memberikan sumbangan saran kebijakan berdasarkan riset dan penelitian yang mereka lakukan. Developer membuat aplikasi yang memanfaatkan teknologi. Media mempromosikan dan mensosialisasikan semua program. Pihak swasta mendukung dengan modal, dan komunitas serta masyarakat turut berpartisipasi dengan mengubah kebiasaan lama yang buruk dan mempraktikkan yang baru. Jika salah satu pihak tidak berkontribusi, maka konsep ini tidak akan berjalan dengan baik

Langkah Strategis Keberhasilan Beberapa Kota Menuju Konsep Smart City Keberhasilan penerapan menuju kota cerdas seperti Surabaya dalam pembangunan dan pengelolaan kota yang lebih cerdas dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia maupun Semarang yang dalam Smart City Expo World Congress sebagai finalis World Smart City Tentunya keberhasilan tersebut memiliki indikator tolak ukur tersendiri, diantaranya : smart living, environment (lingkungan), utility (utilitas/prasarana), economy (ekonomi), mobility (mobilitas), people (manusia, masyarakat). Keenam konsep kota cerdas ini dapat dikembangkan berdasarkan kriteria dan karakteristik kebutuhan penduduk perkotaan, yang tidak sama antara kota yang satu dengan yang lainnya. Meninjau langkah strategis kota Semarang dalam membangun kotanya menuju konsep Smart City, diawali dengan langkah

Pemerintah Walikota Semarang dibawah Hendar Prihadi berfokus pada menyiapkan pondasi dan infrastruktur, melatih aparatur lebih smart dan tech-oriented serta mulai berinisiatif open government.

Pemerintah Kota melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan jalur fiber optic dan bandwidth internet hingga seluruh kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kamera CCTV Pemerintah Kota telah terhubung jaringan. Pemerintah membangun Semarang Command Center (SCC) yang bekerjasama dengan IBM Indonesia

dan PT. Jasnita untuk menyediakan platform Smart City. Tujuan dibangunnya SCC adalah untuk memberikan layanan akses yang cepat dan efisien kepada masyarakat terhadap bantuan permasalahan kota 24 jam dimana saja dalam wilayah pemerintah kota Semarang. Serta peran aparat dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Pemerintah membangun Teknopolis yang dirancang sebagai pusat industri teknologi informasi dan komunikasi. Dan langkah yang terus dilakukan oleh pemerintah kota adalah menggandeng pengembang aplikasi local untuk membuat aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh warganya untuk mengakses data dan informasi Pemerintah Kota Semarang. Semua langkah tersebut membawa kota Semarang sebagai finalis World Smart City. Adapun langkah strategis Kota Surabaya, Jakarta, Surabaya dan kota lainnya menunjukkan tahap-tahap strategis yang hampir sama yakni memiliki langkah untuk menuju konsep Smart City dengan menggunakan keberanian investasi, open government dan inovasi.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Implementasi Pemerintah Kota Semarang dalam membangun smart city telah terlaksana dengan baik, karena telah dapat membangun program-program yang berdaya guna, dan berkelanjutan. Serta berbagai prestasi yang telah diperoleh oleh Kota Semarang terkait inovasi pembangunan yang dilakukan.

Namun penulis masih menemukan kekurangan pada web dan e-government dan beberapa aplikasi yang dibuat oleh pemerintah kota Semarang website Pemerintah Kota Semarang telah dapat memberikan informasi publik yang interaktif dan up to date. Selain memberikan informasi website Pemerintah Kota Semarang juga telah menyediakan link ke lembaga lembaga lain, akan tetapi terkadang link OPD yang dituju masih minim informasi atau out date, hingga layanan yang disediakan tidak dapat diakses. Tingkat ketiga yaitu pemantapan, dikategorikan untuk website yang menyediakan setidaknya satu layanan elektronik berupa website atau aplikasi untuk layanan publik, aplikasi yang dimaksud dapat berupa formulir pendaftaran ijin online, yang dapat memperpendek prosedur ijin. Tahap ini merupakan tahap yang perlu sekali diperhatikan, karena dalam tahapan ini pemerintah mulai dituntut untuk memberikan inovasi inovasi pelayanan publik. Dalam tahapan ini pelaksanaan e government tidak hanya sebatas memberikan informasi tetapi memberikan pelayanan yang nyata dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan berbagai aplikasi guna meningkatkan pelayanan public melalui website maupun aplikasi yang dapat diunduh melalui perangkat mobile. Setidaknya terdapat 37 aplikasi pelayanan publik yang disediakan di website Kota Semarang. Inovasi lain yaitu mengenai pengaduan masyarakat yang dipermudah dengan inovasi call center 112. Dari segi perijinan, Pemerintah

Kota Semarang memiliki 7 aplikasi perijinan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian masih terdapat beberapa pelayanan publik yang tidak dapat diakses di website Kota Semarang. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam tahap ini Pemerintah Kota Semarang masih kurang maksimal. Aplikasiaplikasi yang disediakan masih banyak yang tidak dapat diakses.

DAFTAR PUSTAKA\

Buku

- Agung Ridlo Mohammad, 2015. *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan* Yogyakarta : Pustaka Deepublish.
- Abidin, Said Zainal (2012).*Kebijakan Publik (Edisi 2)*.Jakarta : Salemba Humanika.
- Budhihardjo, Eko.2014. *Revolusi Perkotaan*:Kompas Gramedia
- Budhihardjo, Eko. 1999. Kota Berkelanjutan:Penerbit Alumni
- Dunn, N.William. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas pelayanan Publik*. Yogyakarta:Gava media.
- H.B. Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Surakarta:UNS Press.
- Indrajit, Richardus Eko. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis internet dan Teknologi Informasi*.Jakarta: Aptikom
- Moleong. J. Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mufiz, ali. (2004). *Pengantar ilmu administrasi negara*. Jakarta:Universitas terbuka
- Nugroho,Riant,, 2008.*Public Policy*. Jakarta : PT Gramedia.

Jurnal

- Mursalim, Widhoretno Siti. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota *Bandung*.
Jurnal Ilmu Administrasi.
- Ismardiyansyah. Kesiapan Bus Rapid Transit Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Pelayanan Untuk Mencapai Inovasi Smart Mobillity Semarang:*Universitas Diponegoro. Jurnal ILMU PEMERINTAHAN* Vol.4 No.2, 2015
- Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A.,Hayes, N. M., & Nelson, L. E. (2010). Helping CIOs Understand Smart City Initiatives: Defining the Smart City, Its Drivers, and the Role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc. Available at [nitiatives.pdf](#).
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. Available at [eu/download/smart_cities_final_report.pdf](#).

Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28). Available at oyxp82/webviewable/pdf.

Caragliu, A; Del Bo, C. & Nijkamp, P (2011). Smart cities in Europe, Journal of Urban Technology, 70. es_journal_of_urban_technology_2015_aom_etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../s_chapter1.pdf Makalah Kuliah Tamu dengan Tema : Menuju Konsep Smart City 8.

Sumber Perundangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 mengenai komitmen pemerintah untuk mewujudkan “Good Governance”

Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017. Tentang Integrasi Sistem Data.

Skripsi.

Bangun, Gary Ekatama, 2018 Universitas Sumatra Utara.

Sumber Lain :

RPJMD Kota Semarang, 2017

Renstra Diskominfo Kota Semarang Tahun 2016-2021

Prosiding Seminar Hari tata ruang 2016 Universitas Brawijaya

www.semarangkota.go.id/

semarangkota.bps.go.id

Studio Tata Kelola Perkotaan Semarang Smart City 2019 Aditya Purnomo Aji diakses melalui https://issuu.com/adityapurnomoa/docs/30_april_2019-slide_presgab_fix_v2 Pada 16 Desember 2019 Pukul 10.25.

Kota-Kota di Indonesia Semakin Sakit. R Firkan Maulana diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/firkan/5b8f409c43322f2>

8c156ff32/kota-kota-besar-di-indonesia-makin-sakit Pada 16 Desember 2019 Pukul 11.16.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/i-jus-melon-dari-kota-semarang>.

semarangkota.go.id/p/538/ambulan_hebat,_terdepan_dalam_melayani_kegawat_daruratan_di_kota_semarang. Diakses pada 14 Januari 2020 Pukul 15:32.

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/81495/call-center-gawat-darurat-112-diluncurkan>. Diakses pada 14 Januari 2020 Pukul 15:45.

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/09/20/antisipasi-kekeringan-bangun-embung-di-gunungpati/>. Diakses pada 14 Januari 2020 Pukul 16.06.

<https://news.detik.com/berita/d-4788225/fokus-bangun-smart-city-walkot-semarang-dapat-anugerah-ki-hajar>. Diakses pada 10 Januari 2020 Pukul 18:50

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-tetapkan-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2016>.

<https://news.detik.com/berita/d-4637634/kota-semarang-raih-3-penghargaan-walkot-hendi-mari-kita-pertahankan>. Diakses pada 10 Januari 2020 Pukul 18:55

<https://kumparan.com/kumparannews/melihat-kelayakan-semarang-jadi-kota-ramah-anak-1rsb30PEX04>. Diakses pada 10 Januari 2020 Pukul 19:05

<https://www.antaraneews.com/berita/1066270/puskesmas-lebdosari-jadi-contoh-puskesmas-ramah-anak-di-semarang>. Diakses pada 10 Januari 2020 Pukul 19:11

Diakses pada 10 Januari 2020 Pukul 19:58.

<http://seputarsemarang.com/rute-bus-brt-trans-semarang-koridor-i-ii-dan-iv/>. Diakses pada 11 Januari 2020

<http://transsemarang.semarangkota.go.id/portal/page/berita/Inovasi-Digital-dalam-rangka-meningkatkan-jumlah-pengguna-angkutan-umum>. Diakses pada 12 Januari 2020 pukul 10:28

<http://transsemarang.semarangkota.go.id/portal/page/berita/Lebih-Dekat-Dengan-Masyarakat-Trans-Semarang-Jangkau-Perumahan>. Diakses pada 12 Januari 2020 Pukul 12:40